

MODEL PENGAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Maman S Mahayana

Mencermati situasi pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di negeri ini, segalanya tampak seperti berlangsung baik-baik saja. Kurikulum yang gonta-ganti diterima dengan baik-baik saja, meskipun para guru dibuatnya kelimpungan. Adagium: ganti menteri, ganti kurikulum, dengan berat hati, disikapi, juga dengan baik-baik saja. Ujian Nasional (UN) yang dalam banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah ‘melahirkan tim sukses’ juga saban tahun masih terus berlangsung. Begitulah, pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di semua peringkat sekolah—bahkan juga di perguruan tinggi—, dari tahun ke tahun, menggelinding seperti sebuah rutinitas dengan segala kehebohan dan keluh-kesahnya.

Sejalan dengan situasi itu, tidak sedikit orang merasa prihatin dengan kemampuan keterampilan berbahasa para pelajar—dan mahasiswa—kita. Taufiq Ismail menyebutnya: “Rabun membaca, lumpuh menulis!” Kondisi dan situasi tersebut juga menimpa kesusastraan Indonesia. Masyarakat –dan pemerintah—tidak menganggap penting perkembangan kesusastraan kita. Mungkin lantaran sastra tidak secara langsung menghasilkan materi dan kekuasaan, maka biarlah sastra diurus oleh para sastrawan sendiri, heboh sendiri, sementara masyarakat tetap memasabodohkannya. Survei yang dilakukan Litbang *Kompas*, 3-5 Juni 2015, memperkuat sinyalemen itu. Disimpulkan, bahwa sebanyak 512 responden yang berdomisili di 12 kota besar di Indonesia dan dipilih secara acak, 67,6 % menyatakan tidak suka puisi.¹

Mengapa bisa terjadi begitu? Apa akar masalahnya sehingga bahasa Indonesia—sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa persatuan—dan kesusastraan Indonesia sebagai ekspresi kebudayaan bangsa, tetap terpinggirkan dalam beberapa decade perjalanan bangsa Indonesia?

Mari kita coba menengok ke belakang. Saya mulai dari pernyataan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) berikut ini yang dilontarkan lebih dari sepuluh windu yang lalu: “*Pada*

* Seminar “Pendidikan dan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia” Diselenggarakan Universitas Muria, Kudus, 10 September 2016.

* Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok.

¹ Hasil survei itu dimuat *Kompas*, 10 Juni 2015 menegaskan, bahwa puisi bagi masyarakat kita –setidak-tidaknya yang menjadi responden survei itu—tidaklah penting. Oleh karena itu, dapat dipahami jika kemudian mereka tidak mengenal nama-nama penyair Indonesia, apalagi puisi-puisinya. Meskipun hasil survei itu tidak representatif, sebab sangat mungkin respondennya masyarakat awam yang tidak terdidik atau mereka yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan komunitas sastra, setidaknya, survei itu dapat dijadikan indikator, bahwa masyarakat kita tidak menempatkan puisi sebagai sesuatu yang penting dibandingkan sinetron atau produk budaya populer lainnya.

*sekolah menengah Goebnemen sekarangpoen masih haroes kita berkata, bahwa pengadjaran bahasa Indonesia itoe tidak berarti sedikit djoepoen.”*² Di bagian lain, Alisjahbana mengatakan:

Pengadjarannja jang menghamba kepada gramatika bahasa jang dipakai, ketika nenek mojang kita masih berdjalan kaki dan naik bidoek jang rapoeh itoe, mematkan segala minat kepada bahasa. Tjara mengadjarkan jang tiada bersemangat, jang semata-mata mengisi kepala dengan tiada memperdoelikan semangat kanak-kanak, dalam segala hal mematkan kegembiraan kepada bahasa.

Boekoe batjaan, boekoe ilmoe bahasa!

Bahasa jang sepatoenja diadjarkan disekolah oentoek dipakai dalam penghidoepan mendjadi sesoeatoe jang sengadja diadjarkan semata-mata untuk sekolah itoelah.³

Nah, sudah sekian puluh tahun yang lalu STA mengingatkan, bahwa “*Pengadjarannja jang menghamba kepada gramatika bahasa jang dipakai, ketika nenek mojang kita masih berdjalan kaki dan naik bidoek jang rapoeh itoe, mematkan segala minat kepada bahasa.*”

Itulah salah satu sumber masalah, mengapa pelajaran bahasa Indonesia yang mestinya menekankan aspek keterampilan, bergeser menjadi pelajaran pengetahuan tentang bahasa.

Kritik STA jelas ditujukan pada sistem pengajaran dan pada guru-guru Belanda yang mengajar bahasa Melayu. Pertama, pada zamannya belum banyak sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda yang dapat dimasuki penduduk pribumi, kecuali anak-anak keluarga bangsawan. Jadi, bagaimana mungkin para murid terampil berbahasa Indonesia jika sistem pengajarannya lebih menekankan pada tata bahasa dan pengetahuan bahasa. Kedua, belum banyak guru-guru pribumi yang bisa mengajar di sekolah-sekolah pemerintah. Dengan begitu, sasaran kritik STA tentu dialamatkan pada guru-guru Belanda yang kerangka berpikirnya juga Belanda. Ketiga, sudah sistem pengajarannya dengan semangat kolonial Belanda, guru-gurunya Belanda, buku-buku pelajaran bahasa Melayu yang digunakan di sekolah ketika itu, juga buku-buku tata bahasa Melayu karya para pengarang Belanda yang konsepsinya juga bersumber pada buku-buku tatabahasa Belanda.⁴ Jadi, segalanya serba-Belanda. Maka, sangat wajar jika

² Sutan Takdir Alisjahbana, “Pengadjaran Bahasa” *Poedjangga Baroe*, No. 2, Th. I, Agoestoes 1933, hlm. 33—35.

³ *Ibid.*, hlm. 35.

⁴ Beberapa buku tatabahasa yang berpengaruh bagi sejarah perjalanan (tatabahasa) Indonesia, dapatlah disebutkan di sini karya-karya Joannes Roman (1653), George Henrik Werndly (1736), William Marsden (1812), John Crawfurd (1852), J.J. de Hollander (1882), Gerth van Wijk (1889), R.O. Windstedt (1914), Ch. A. Van Ophuijsen (1915). J. Lihat Harimurti Kridalaksana, “Sejarah Pembagian Kelas Kata dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia,” dalam Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia; Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 284—311. Kridalaksana juga memasukkan karya-karya Raja Ali Haji (1857 dan 1859) dan Koewatin Sasrasoeganda (1910) sebagai buku tatabahasa yang penting dalam usaha membagi kelas kata dalam bahasa Melayu.

pelajaran bahasa Indonesia⁵ di sekolah diajarkan berdasarkan cara pandang tata bahasa Belanda. Itulah awal mula pelajaran bahasa (Indonesia) di sekolah cenderung lebih menekankan pada pengetahuan linguistik dibandingkan pada keterampilan berbahasa.⁶

Ketika di Padang tahun 1937 terbit sebuah buku berjudul *Kitab Ilmoe Sjaraf Melajoe Oemoem* karya B.R. Motik, muncul resensi buku yang ditulis Darmawidjaja dalam rubrik Timbangan Buku Majalah *Pujangga Baru*.⁷ Darmawidjaja menyebutkan hal yang senada sebagaimana yang disampaikan STA. Dikatakannya:

“Penulisnya belum lagi dapat melepaskan dirinya dari pada tradisi, yakni tradisi terlalu menyandarkan uraian-uraiannya kepada cara yang selama ini ditempuh: kepada kitab-kitab ‘ilmu bahasa yang telah ada, padahal kitab-kitab itu bersandarkan belaka pada gramatika penjelasan bahasa-bahasa Indo-Jerman. Di mana *categorientafel* Aristoteles, yang dibuat sendi untuk menerangkan hal-hal yang terdapat dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman masih jauh dari sempurna, apakah yang akan kita harapkan jika *categorientafel* itu juga yang kita pakai sebagai dasar untuk menerangkan seluk-beluk bahasa Melayu Umum, salah satu dari ranting-ranting bahasa pokok Austronesia yang sangat berbeda dengan bahasa-bahasa Indo-Jerman.”

....

Cara mereka bekerja masih terlalu terikat pada gramatika Latin.⁸

Bagaimana pula tanggapan STA atas buku itu? Saya kutip beberapa bagian pernyataannya berikut ini:

Kurang kecakapan dan keahlian itu terbayang pada tiap halaman Ilmu Syaraf ini: *constructienya* goyah, tidak kokoh padu: *definitie* banyak tidak tepat, pembahagian kurang kena, kata yang dipilih untuk nama sesuatu *verschijnsel* (kenyataan, msm) bahasa tidak memuaskan.

Raja Ali Haji mendasari tata bahasanya berdasarkan tata bahasa Arab, sedangkan Sasrasoeganda (*Djalan Bahasa Melajoe*) merujuk pada karya Gerth van Wijk. Pelajaran bahasa Melayu di sekolah pemerintah pada akhirnya juga menggunakan buku-buku itu sebagai bahan pelajaran. Itulah yang menjadi alasan STA menyebut pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menghamba pada gramatika atau tata bahasa.

⁵Meskipun sejak Sumpah Pemuda, 1928, penyebutan dan pemakaian bahasa Indonesia di masyarakat makin luas, bahkan juga pada tanggal 25—27 Juni 1938 di Solo diselenggarakan Kongres Pertama Bahasa Indonesia, pihak Belanda tetap menyebutnya sebagai bahasa Melayu. Baru pada awal tahun 1950, mengikuti hasil Kongres Meja Bundar di Denhag, Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak lagi menggunakan istilah bahasa Melayu, melainkan bahasa Indonesia. Politik kolonial Belanda ini berbeda dengan politik pendudukan Jepang. Sejak kedatangan bala tentara Jepang dan menguasai wilayah Indonesia, Maret 1942, pemerintah pendudukan Jepang justru mengembangkan bahasa Indonesia dengan mendirikan Komisi Istilah.

⁶ Berdasarkan tulisan Armijn Pane (dimuat di surat kabar *Bintang Timur* (?), dimuat kembali di majalah *Poedjangga Baroe*, No. 5, Th. II, November 1934, bahasa Melayu belum diajarkan di sekolah-sekolah desa di Jawa Barat. Oleh karena itu, penting artinya pelajaran bahasa Melayu di sekolah.

⁷ Darmawidjaja, “Kitab Ilmoe Sjaraf Melajoe Oemoem,” *Poedjangga Baroe*, No. 9, Th. V, Maart 1938, h. 209-214.

⁸ Darmawidjaja, *Ibid*. Ejaan pada kutipan disesuaikan dengan EYD.

Tidak ada *analyse* bahasa yang jelas, sebab itu di atasnya tidak pula mungkin *synthese* yang memadai.⁹

Begitulah, sebelum Indonesia merdeka, buku-buku yang digunakan sebagai bahan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak lain adalah buku-buku tata bahasa yang konsep dan cara berpikirnya Belanda. Dapat dipahami jika kemudian, pelajaran bahasa Indonesia cenderung lebih berat pada tata bahasa daripada keterampilan berbahasa. Penekanan pada tata bahasa itulah yang terjadi sampai sekarang. Lebih parah lagi, pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mulai terjerumus ke dunia linguistik.

Kondisi pelajaran sastra (Indonesia) di sekolah-sekolah, juga menjadi pelajaran pengetahuan sastra mengikuti model pelajaran bahasa (Indonesia). Bahkan, pelajaran sastra sekadar salah satu bagian dari pelajaran bahasa. Situasi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah itu, tidak berbanding lurus dengan kehidupan kesusastraan. Persoalannya menjadi lebih jelas jika kita coba mencermati perkembangan penerbitan buku-buku sastra.

Dalam perjalanan sejarah kesusastraan Indonesia, dasawarsa 1950-an sebenarnya merupakan masa yang paling semarak dibandingkan masa sebelumnya. Berbagai pandangan dan keberagaman sikap dalam mengusahakan kehidupan kesusastraan di masa mendatang, justru lebih ramai pada dasawarsa ini dibandingkan masa *Pujangga Baru*. Situasi itu dimungkinkan dengan munculnya berbagai majalah dan surat kabar yang menyediakan rubrik-rubrik sastra. Maka, betapapun dalam sepuluh tahun itu, novel yang terbit hanya 49 buku, antologi cerpen 48 buku, puisi 32 buku, drama 90 naskah, dan antologi esai 43 buku, jumlah itu sebenarnya sama sekali tidak mewakili situasi kehidupan kesusastraan Indonesia masa itu.¹⁰

Menurut Sapardi Djoko Damono¹¹ yang meneliti pemuatan cerpen, drama, puisi dan esai dalam 24 majalah yang terbit pada dasawarsa 1950-an, jumlah cerpen tercatat 1823, drama 30, puisi 2930, dan esai 770. Sedangkan cerpen, drama, puisi dan esai terjemahan masing-masing

⁹Sutan Takdir Alisjahbana, "Catatan Tambahan," *Poedjangga Baroe*, No. 9, Th. V, Maart 1938, hlm. 216.

¹⁰ Periksa Maman S Mahayana, *Akar Melayu: Ideologi dalam Sastra*, Jakarta: Buku Pop, 2010 (Edisi Revisi, *Akar Melayu: Sistem Sastra dan Konflik Ideologi di Indonesia dan Malaysia*, Magelang: Indonesia Tera, 2001).

¹¹ Sapardi Djoko Damono. "Daftar Karangan Sastra Tahun 50-an." Jakarta: Proyek Penelitian Universitas Indonesia, 1988 (tidak dipublikasikan).

tercatat 331 cerpen, 39 drama, 102 puisi, dan 94 esai. Adapun yang dicatat Kratz,¹² dalam 55 majalah yang terbit tahun 1950-an adalah 6291 puisi, 5043 prosa (cerpen + cerbung), dan 75 naskah drama. Dari jumlah yang dicatat Damono dan Kratz itu, ada di antaranya yang lalu diterbitkan sebagai buku, tetapi sebagian besar, masih tersimpan dalam lembaran majalah itu.

Data kuantitatif itu, belum termasuk karya sastra yang dimuat majalah yang belum diteliti Damono dan Kratz. Koleksi Perpustakaan Nasional, misalnya, masih menyimpan sekitar 140-an majalah terbitan tahun 1950-an di luar sampel kedua peneliti tadi. Jumlah itu, niscaya akan membengkak jika kita juga meneliti karya sastra yang terbit dalam lembaran-lembaran surat kabar. Dengan begitu, jelas bahwa peta kesusastraan Indonesia waktu itu mustahil tergambarkan jika hanya mengandalkan karya-karya sastra yang diterbitkan sebagai buku, sebagaimana dilakukan Teeuw.¹³ Bagaimana hubungannya dengan pengajaran sastra di sekolah?

Kesemarakan kesusastraan Indonesia dalam majalah dan surat kabar itu, ternyata sama sekali tidak didukung oleh penerbitan buku-buku pelajaran sastra yang mengarah pada apresiasi, melainkan sebagai buku pengetahuan sastra dan model-model hapalan. Di samping itu, buku-buku pelajaran sastra, seperti juga buku pelajaran bahasa Indonesia, masih mengandalkan buku-buku karya penulis Belanda.¹⁴ Ketika pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dijadikan sebagai mata ujian negara waktu itu, penerbit-penerbit swasta memanfaatkannya semata-mata untuk kepentingan mencari untung. Maka terbitlah buku-buku soal-jawab ujian negara yang cuma berisi soal-soal berikut kunci jawabannya.¹⁵ Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia makin menjadi pelajaran hapalan karena adanya tuntutan ujian negara itu.

¹²Ernst Ulrich Kratz. *Bibliografi Karya Sastra Indonesia dalam Majalah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.

¹³ A. Teeuw, *Sastra Baru Indonesia 1*, Ende: Nusa Indah, 1978.

¹⁴ Beberapa buku pelajaran sastra yang berpengaruh dalam pelajaran sastra di sekolah, antara lain, G.W.J. Drewes (*Maleise Bloemlezing*, 1947; *Mentjari Ketetapan Baru*, 1949), M.G. Emeis (*Bloemlezing uit het Klassiek Maleis*, 1949), C. Hooykaas (*Literatuur in Maleis en Indonesisch*, 1952; *Penjedar Sastera*, 1952), A. Teeuw dan R. Roolvink (*Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia Baru*, 1952), dan dua buku A. Teeuw (*Sastra Baru Indonesia 1*, 1978; *Sastra Indonesia Modern II*, 1989). Menyusul buku-buku karya para penulis Belanda itu, muncul buku-buku pelajaran sastra karya para penulis kita yang menjadi buku acuan penting dalam pelajaran sastra di sekolah. Beberapa di antaranya dapat disebutkan di sini: Simorangkir-Simandjuntak (*Kesusasteraan Indonesia 1*, 1951, dan *Kesusasteraan Indonesia 2*, 1952), R.B. Slametmuljana (*Bimbingan Seni –Sastra*, 1951), Zuber Usman (*Kesusasteraan Lama Indonesia*, 1954 dan *Kesusasteraan Baru Indonesia*, 1957).

¹⁵Tradisi penerbitan buku-buku soal-jawab ujian bahasa dan sastra Indonesia sebenarnya dimulai pada tahun 1950-an itu, sejalan dengan dimasukkannya pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata ujian negara (: Ujian Nasional).

Boleh jadi ada pertimbangan praktis bagi guru-guru SD, SMP, dan SMA waktu itu. Dalam ujian negara pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di semua tingkatan sekolah, tidak ada persyaratan bagi siswa agar memahami karya sastra. Jadi, tuntutannya adalah dapat menjawab soal dengan benar. Dengan begitu, menghafal nama-nama pengarang, judul buku, pembabakan angkatan, tahun penerbitannya, dan berbagai contoh baku gaya bahasa, menjadi lebih penting daripada membaca karya sastranya. Akibatnya, yang dipentingkan adalah: benar menjawab soal dan lulus ujian dan bukan memahami karyanya. Itulah yang juga terjadi dalam pelajaran bahasa Indonesia belakangan ini lantaran adanya Ujian Nasional. Siswa tidak dituntut memahami karya sastra, terampil menulis dan mengapresiasi karya sastra, tetapi cukuplah dapat menjawab soal ujian dengan benar. Boleh jadi, problem itu pula yang terjadi di banyak perguruan tinggi kita yang menyelenggarakan program studi bahasa dan sastra Indonesia.

Bagaimana dampaknya dengan sistem pengajaran sastra yang seperti itu? Secara cerdas penerbit-penerbit swasta yang bermunculan waktu itu memanfaatkan kebutuhan mendesak bahan pelajaran sastra, termasuk di dalamnya soal-soal pelajaran tersebut. Maka, buku-buku model soal-jawab, sari kesusastraan, persiapan ujian, latihan ujian dan buku sejenisnya menjadi produk unggulan para penerbit.

Pada dasawarsa tahun 1950-an itu, dari sekitar 157 penerbit swasta yang tersebar di kota besar di Indonesia, kurang dari 10 penerbit yang menerbitkan buku sastra. Selebihnya sekitar 147 penerbit, menerbitkan buku pelajaran sekolah, termasuk pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, buku sastra (puisi, novel, antologi cerpen, dan drama—termasuk yang dimuat dalam majalah) yang diterbitkan waktu itu berjumlah 237 buah, sedangkan buku pelajaran sastra—tak termasuk buku pelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya juga memuat soal-soal kesusastraan— tercatat 126 buku. Buku-buku seperti itulah yang kemudian digunakan para guru dalam pengajaran sastra di sekolah-sekolah.

Sementara itu, buku-buku kritik H.B. Jassin, seperti *Kesusastraan Indonesia Di Masa Jepang* (1948), *Gema Tanah Air* (1948), *Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45* (1956), pada tahun 1950-an itu sebenarnya dapat digunakan untuk bahan pengajaran sastra di sekolah mengingat di sana disertakan sejumlah karya pengarang kita. Buku H.B. Jassin yang lain, seperti *Tifa Penyair dan Daerahnja* (1952) dan *Kesusasteraan Indonesia dalam Kritik dan Essay* (1953), meskipun

bersifat pengetahuan, kedua buku itu juga dapat dimanfaatkan untuk bahan apresiasi sastra.¹⁶ Hal yang sama berlaku bagi buku Amal Hamzah, *Buku dan Penulis* (1950), A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh* (1952), Zuber Usman, *Kesusastraan Lama Indonesia* (1954) dan *Kesusastraan Baru Indonesia* (1957). Buku-buku itu yang lebih bersifat pengetahuan dan kesejarahan itu sayangnya tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan siswa dengan karya sastranya, tetapi cukup sebatas sebagai pengetahuan belaka. Akibatnya, pelajaran sastra di sekolah tergelincir sebagai pelajaran pengetahuan tentang sastra.

Bolehlah dikatakan, bahwa pemancangan pelajaran bahasa dan kesusastraan (Indonesia) dalam dunia pendidikan kita, terjadi pada tahun 1950-an dengan sistem yang seperti itu. Argumennya berikut ini: Pertama, sistem pendidikan kita di awal kemerdekaan lebih menyerupai sistem *coba-coba*. Dari 17 Agustus 1945 sampai 2 Oktober 1946, jabatan Menteri PPK telah empat kali *gonta-ganti*. Sistem pendidikan pun, masih *bongkar-pasang*. Kedua, pembukaan sekolah lebih mengutamakan sekolah kejuruan teknik mengingat kebutuhan tenaga kerja praktis sangat mendesak. Ketiga, pembagian ilmu untuk perguruan tinggi, yaitu ilmu alam, ilmu kebiduan dan ilmu sosial, telah menempatkan pendidikan kesusastraan makin terpojok; terkesan sebagai pelengkap.¹⁷ Sistem pendidikan itulah yang terus bergulir hingga kini yang ekornya menempatkan pengajaran sastra cuma sebagai pelengkap; sebagai pelajaran sampingan.

Demikianlah, harapan agar pengajaran bahasa dan kesusastraan Indonesia di sekolah tak menekankan segi linguistik melainkan keterampilan, menghindari bentuk hapalan, dan lebih bersifat apresiatif, tetap akan terbentur pada sistem pendidikan kita yang selalu memicingkan mata terhadap keterampilan menulis dan pendidikan moral lewat pengajaran kesusastraan ini. Benturan lainnya datang pula dari guru-guru yang lebih suka cari praktisnya; membuat soal yang

¹⁶ Belakangan terjadi kesalahanpahaman dalam menempatkan buku H.B. Jassin ini, terutama buku kritik dan esainya. Kedua buku itu sebenarnya merupakan kumpulan tulisan yang pernah dimuat di berbagai majalah dan makalah ceramah sastra. Sebagai sebuah kajian, yang dilakukan Jassin termasuk kategori kritik sastra umum yang sifatnya apresiatif. Jadi jika menempatkan Jassin sebagai kritikus sastra yang berwibawa, posisinya bukan lantaran kedua buku itu, melainkan pada kiprahnya sebagai dokumentator sastra dan kedekatan dan semangatnya dalam membina para sastrawan kita ketika itu.

¹⁷ Pembagian bidang ilmu: eksakta, sosial, dan budaya, entah bagaimana ceritanya sehingga muncul anggapan, bahwa jurusan eksakta lebih unggul dari jurusan ilmu pengetahuan sosial, dan jurusan budaya dicitrakan sebagai tempat orang-orang buangan. Sampai sekarang, pandangan itu masih melekat kuat di masyarakat, bahkan juga di dunia pendidikan kita.

jawabannya sudah baku. Atau, guru-gurunya sendiri yang terlalu malas menulis dan membaca khazanah kesusastraan kita, apalagi mengikuti perkembangannya.

Lalu, langkah apa yang mesti diambil untuk memecahkan masalahnya? Inilah (mungkin) solusinya: Pertama, peninjauan kembali (atau perombakan) sistem pengajaran bahasa dan sastra di semua tingkat pendidikan, teristimewa pendidikan untuk mencetak guru sastra. Kedua, pelibatan sastrawan secara aktif dalam pengajaran sastra di semua sekolah, termasuk di sekolah kejuruan. Ketiga, pemisahan pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Jika mungkin, pelajaran bahasa Indonesia di tingkat Sekolah Dasar dihapuskan dan diganti dengan pelajaran Mengarang dalam bahasa Indonesia dan Apresiasi Sastra Indonesia.

Meski begitu, semuanya cuma mungkin terlaksana dengan baik, jika pihak pemerintah sendiri menanggapi secara positif masalah itu. Selama pemerintah menyepelkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan memicingkan mata terhadap kesusastraan bangsanya, selama itu pula keprihatinan berkepanjangan akan terus muncul sebagai asap; hilang dalam sekejap. Itulah kondisi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam dunia pendidikan kita.

Msm.mklh.umk.10-09-16